

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan, 2003.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2004.
- I Wayan, Suandra. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta Anggota (IKAPI), 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Muchsin, Imam Koeswahyono, dan Solihin. *Hukum Agraria Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2007.
- Perangin, Effendi. *401 Pertanyaan dan Jawaban tentang Hukum Agraria*. Jakarta : CV. Rajawali, 1986.
- S alindeho, John. *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Soetiknjo, Iman. *Proses Terjadinya UUPA*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1987.
- Suharingsih. *Tanah Terlantar*. Jakarta : Prestasi Pustakarya, 2009.
- Sumardjono, Maria S.W. *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Sutedi, Adrian. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Parlindungan, A.P. *Hak Pengelolaan menurut Sistem UUPA*. Bandung: Mandar Maju, 1989.

Jurnal, Tesis dan Disertasi

Hadjon. Philipus M. "Tentang Wewenang", *Majalah Yuridika*, No. 5 dan 6, Tahun XII, Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1997.

Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuursbevoegdheid)", *Majalah Pro Justitia*, Jakarta, 1998.

Hajati, Sri "Pengaturan Hak Atas Tanah dalam Kaitannya dengan Investasi", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.

Setiawan, Yudhi dan Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, "Cacat Yuridis dalam Prosedur sebagai alasan Pembatalan Sertifikat oleh Peradilan Tata Usaha Negara" *Jurnal Equality*, Vol. 13, No. 1, Februari, 2008, h. 1

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643)

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745)

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098)

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan

Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2013 tentang Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Peratanahan.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 4 tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tentang Uji Materi terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Putusan No. 03/PK/TUN/2009 antara PT. Sinar Kartasura melawan Badan Pertanahan Nasional